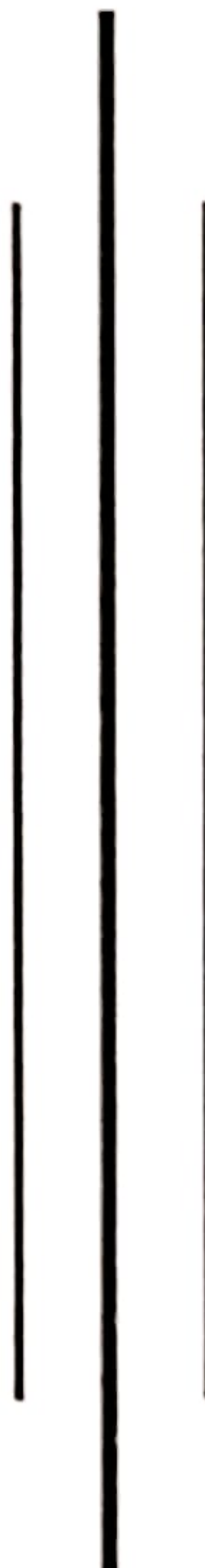




**KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA
NOMOR 143/10/2023**

**TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PKPKD KEPADA
PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA
DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA DERSALAM
TAHUN 2023**



KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA

NOMOR : 143/10/2023

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
ASET DESA KEPADA
PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA
DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
21. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 010 / 2019 tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
22. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 011 / 2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
23. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Dersalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2023 (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Aset Desa Di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Wewenang Kepala Desa sebagaipemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
- f. menyetujui usul pindah tanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan, dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

KETIGA

Sekretaris Desa selaku pembantu Pengelolaan Aset Desa mempunyai wewenang :

- a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

KEEMPAT

Petugas/pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
- d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
- f. mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

KELIMA

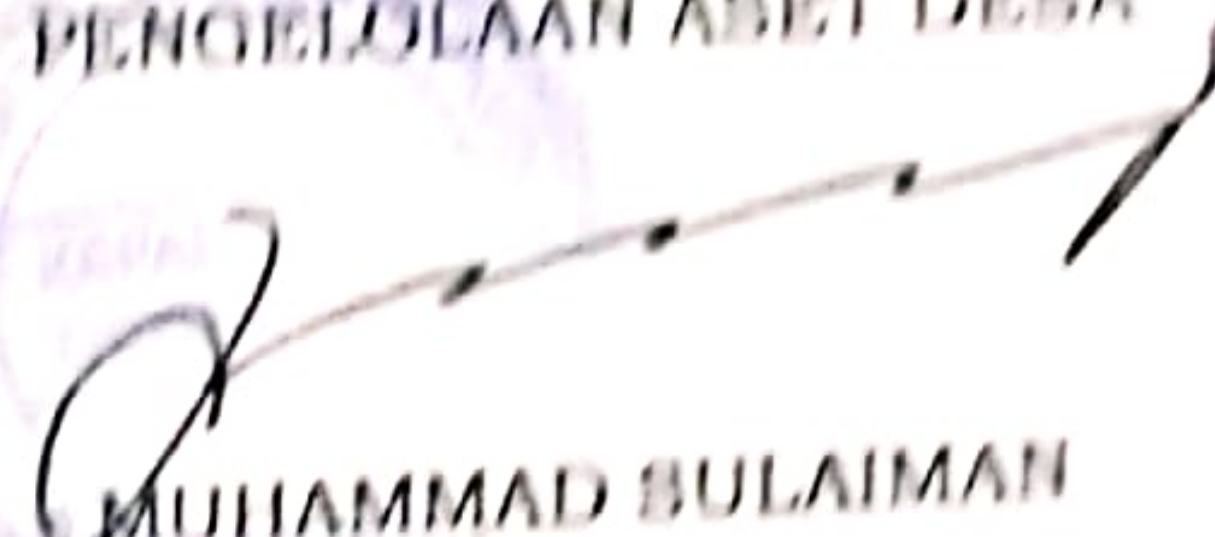
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023

Ditetapkan di Dersalam
Pada tanggal 1 April 2023

KEPALA DESA DERSALAM
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN ASSET DESA



MUHAMMAD SULAIMAN

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Dersalam.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
Nomor : 143/10/2023
Tanggal : 1 April 2023

PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	Keterangan
1	2	3	4	6
1.	MUHAMMAD SULAIMAN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	Sesuai Tupoksi
2.	DELYA SASKI ANANDA	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa	Sesuai Tupoksi
3.	MARIA SUSANTI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa	Sesuai bidang tugasnya
4.	WIDYAWATI	Kasi Pemerintahan	Anggota	Sesuai bidang tugasnya
5.	ACHMAD SAID SATDI	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Sesuai bidang tugasnya
6.	SRI AESITYAH	Kasi Pelayanan	anggota	Sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA DERSALAM


MUHAMMAD SULAIMAN